



Determinasi Kemiskinan Perdesaan di Indonesia

Dian Nora Herlina^{1*}, Kikin Windhani²

¹⁻²Magister Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Penulis korespondensi: dian.herlina@mhs.unsoed.ac.id¹

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the effect of village fund realization, human development index, realization of the number of families receiving food social assistance, and the Gini ratio of rural areas on the percentage of poor people in rural areas in Indonesia. This is a quantitative study, located in Indonesia with case studies from 2018 to 2023. The data analysis technique used panel data regression analysis. The results show that the realization of village funds, the human development index, and the realization of the number of families receiving food social assistance have a significant negative effect on the percentage of poor people in rural areas in Indonesia, while the Gini ratio of rural areas has a significant positive effect on the percentage of poor people in rural areas in Indonesia. The implications of this study indicate that the government needs to optimize the use of village funds for productive activities, improve the quality of education, health, and job skills, and ensure that food social assistance is targeted accurately through accurate data collection. Additionally, policies for equitable village development must be strengthened through income diversification, access to capital for the poor, and community-based economic development.*

Keywords: *Gini Ratio; HDI; Poverty; Social Assistance; Village Funds*

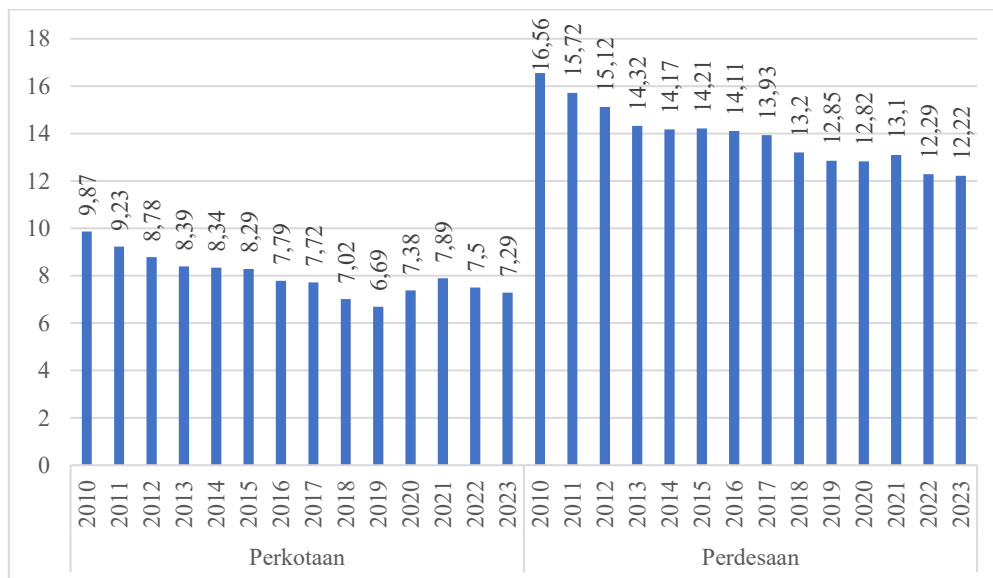
Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh realisasi dana desa, indeks pembangunan manusia, realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan dan gini ratio daerah perdesaan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia. Jenis penelitian kuantitatif, berlokasi di Indonesia dengan studi kasus dari tahun 2018 sampai 2023. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi dana desa, indeks pembangunan manusia dan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan berpengaruh negatif signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia, sementara gini ratio daerah perdesaan berpengaruh positif signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan dana desa pada kegiatan produktif, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja, serta memastikan bantuan sosial pangan tepat sasaran melalui pendataan yang akurat. Selain itu, kebijakan pemerataan pembangunan desa harus diperkuat melalui diversifikasi pendapatan, akses permodalan bagi kelompok miskin, dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Kata Kunci: Bantuan Sosial; Dana Desa; Gini Ratio; IPM; Kemiskinan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi ialah suatu proses yang melibatkan perubahan sistem, perilaku dan kelembagaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Todaro & Smith, 2020). Kemiskinan adalah salah satu faktor yang menghalangi proses pembangunan ekonomi. Indonesia termasuk negara berkembang yang berpenghasilan menengah kebawah, kemiskinan tetap ada di sana. Kemiskinan ialah keadaan di mana seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Selain itu, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan pembangunan yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat menyebabkan sebagian masyarakat tidak merasakan manfaat dari proses pembangunan (Arsyad, 2010).

Presentase penduduk miskin, juga dikenal sebagai *Head Count Index* (HCI-P0) ialah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di suatu daerah ditunjukkan oleh angka-angka yang ditunjukkan oleh *head count index*, dan tingginya rasio menunjukkan juga tingginya proporsi rumah tangga miskin di daerah tersebut (BPS, 2024). Di Indonesia, kemiskinan adalah kombinasi dari kemiskinan perdesaan dan perkotaan. Menurut *Head Count Index* (P₀) jumlah penduduk miskin daerah perdesaan lebih banyak daripada perkotaan. Selain itu, menurut *Poverty Gap Index* (P₁) dan *Poverty Severity Index* (P₂), di daerah perdesaan rata – rata pengeluaran penduduk miskin menjauh dari garis kemiskinan dan terdapat ketimpangan pengeluaran yang lebih besar di antara penduduk miskin di perdesaan. Berikut ini adalah grafik kondisi kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Indonesia.



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2010-2023.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin daerah perdesaan dan perkotaan di Indonesia mengalami penurunan yang baik. Kondisi kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam tingkat kemiskinan di kedua wilayah, dengan tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pembangunan ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui program yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh dapat di realisasikan dengan baik. Namun, pandemi COVID-19 menurunkan produktivitas setiap industri pada tahun 2020, menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Menurut Lestari (2016) menyatakan faktor terkait kemiskinan di tingkat desa/keluarga adalah kondisi jalan rusak, rendahnya keterampilan manusia dan pendidikan, kondisi kerja yang buruk, bencana alam

seperti tanah longsor dan kekeringan, kurangnya kesempatan kerja dan potensi ekonomi daerah yang belum dimanfaatkan. Penelitian oleh Abdjul *et al.*, (2023) menyatakan bahwa dana desa terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Bidang pertanian, ekonomi sosial sarana air bersih, jembatan, jalan, perikanan, dan kemasyarakatan, adalah beberapa bidang pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah desa. Dana yang diberikan kepada setiap desa dimaksudkan untuk membangun infrastruktur, yang akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di setiap desa. Selain itu, diharapkan pemerintah desa dapat memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melibatkan penduduk desa dalam kegiatan pembangunan desa (Dewi & Irama, 2018). Studi oleh Lalira *et al.*, (2018); Rimawan & Aryani (2019) menyatakan bahwa dana desa dan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan hasil program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah pada tahun sebelumnya, yaitu mengukur perbandingan standar hidup, pendidikan, harapan hidup, dan melek huruf, untuk semua negara di seluruh dunia. IPM mengukur dan menunjukkan peningkatan program pembangunan di awal dan akhir suatu periode. Kualitas pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan pengetahuan dan keahlian seseorang, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja. Peningkatan produktivitas otomatis dapat meningkatkan pendapatan dan secara tidak langsung mengurangi kemiskinan (Rahmanta *et al.*, 2022). Dengan pendidikan yang baik, diharapkan dapat menghasilkan barang dan jasa secara optimal dan mendapatkan pendapatan yang paling tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan, serta melawan kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan harus diimbangi dengan pengembangan keterampilan melalui program pelatihan pra kerja (Maulidina *et al.*, 2022).

Studi empiris Andykha *et al.* (2018); Prasetyoningrum & Sukmawati (2018) dan Budhijana (2019) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia terdapat pengaruh yang negatif signifikan terhadap kemiskinan. Namun temuan Susanti (2013); Meriyanti, (2015); Sayifullah & Gandasari, 2016) dan Ristika *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara temuan Sinaga (2020); Nafi'ah (2021); Saragih *et al.*, (2022); Yuniarti & Imaningsih (2022) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan, dikarenakan di Indonesia, pembangunan masih belum menguntungkan seluruh masyarakat, yang menyebabkan kesenjangan yang berdampak tidak merata atau proporsional pada kelompok atau wilayah tertentu (Supraba, 2018).

Penelitian oleh Triono & Sangaji (2023) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, inflasi, produktivitas padi, penyaluran bantuan sosial sembako, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dan realisasi anggaran perlindungan sosial. PKH berupaya untuk mengakhiri siklus kemiskinan di kalangan penduduk termiskin. Bantuan PKH yang tepat waktu dapat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan akses dan pemanfaatan upaya serta status pendidikan anak, sehingga menurunkan tingkat putus sekolah, peningkatan partisipasi anak dalam kewajiban program, dan penurunan beban ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup (Rahmanta *et al.*, 2022). Studi oleh Suarni *et al.* (2022) menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak memiliki pengaruh signifikan.

Menurut pendapatannya, ketimpangan di kota lebih besar daripada di perdesaan, artinya meskipun daerah perkotaan memiliki infrastruktur yang baik, peluang kerja, pendidikan, dan jaminan kesehatan yang memadai, ketimpangan sosial masih tinggi karena tingkat urbanisasi yang tinggi, kesenjangan sosial, dan program pembangunan yang belum meratanya. di kota-kota tersebut. Kondisi demografi dan sumber daya alam dan yang berbeda di masing-masing wilayah atau daerah menyebabkan ketimpangan. Menurut penelitian oleh Suparman *et al.* (2021) dan Maskur *et al.* (2023), menunjukkan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan. Namun, penelitian oleh Sianturi *et al.* (2021); Aini *et al.* (2023), ketimpangan pendapatan tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan dan perbedaan hasil penelitian terkait kemiskinan maka perlu dilakukan penelitian terkait pengaruh realisasi dana desa, indeks pembangunan manusia, realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan dan gini ratio daerah perdesaan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia.

2. TELAAH PUSTAKA

Teori Kemiskinan

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka, baik makanan maupun non-makanan, didefinisikan sebagai kemiskinan. Definisi ini didasarkan pada jumlah uang yang dikeluarkan seseorang untuk mengcover kebutuhan tersebut. Jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, seseorang dianggap miskin (BPS, 2021). Menurut Nurkse (1953), siklus kemiskinan dapat dipahami sebagai serangkaian kekuatan yang berinteraksi

untuk menciptakan kondisi dimana suatu negara akan tetap miskin dan terus berjuang untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan kemajuan tertentu (Arsyad, 2010). Nurkse menyatakan bahwa kekayaan alam yang kurang dimanfaatkan dan masyarakat masih terbelakang serta kekurangan modal mengakibatkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan riil rendah. Pendapatan riil rendah berimplikasi dalam rendahnya tabungan dan pembentukan modal masyarakat, berakibat pada keterbelakangan masyarakat dan seterusnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tiga faktor penghambat proses pembentukan modal dan pembangunan ekonomi di berbagai Negara Sedang Berkembang adalah konsep lingkaran kemiskinan: ketidakmampuan untuk memperoleh tabungan yang cukup, taraf pendidikan yang rendah, dan keahlian masyarakat yang relatif rendah. (Arsyad, 2010).

Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, dana desa ialah dana yang dihasilkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) suatu desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota guna mendanai pelaksanaan pembangunan, operasional pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang dipungut dari APBD Provinsi, akan didistribusikan sesuai kriteria yaitu distribusi dan basis distribusi dihitung sesuai jumlah penduduk, indeks kemiskinan, lokasi dan tingkat penduduk kesulitan geografis tiap kabupaten/kota. Tujuan penyaluran dana desa dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan wujud upaya pemerintah untuk membentengi dan memberdayakan desa agar maju, demokratis, mandiri dan kuat, serta adanya bank desa maka desa dapat maju dan memberdayakan desa dalam hal keadilan, kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan *United Nation Development Programme* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah penilaian komparasi dari pendidikan, angka harapan hidup, standar hidup, dan harapan lama sekolah untuk semua negara. UNDP menginterpretasikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memberi orang lebih banyak pilihan. Penduduk dianggap sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dianggap sebagai instrumen dalam menggapai tujuan tersebut. Dalam mencapai tujuan pembangunan manusia terdapat beberapa hal yang penting yaitu produktivitas, pemberdayaan, kesinambungan, dan pemerataan (UNDP, 1995).

Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 terkait Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari APBD mendefinisikan bantuan sosial adalah subsidi bantuan yang tidak berkepanjangan dan selektif dari dana atau program pemerintah daerah kepada individu, keluarga, organisasi, atau komunitas dalam upaya mengurangi risiko sosial (Aminah & Jumaidah, 2022). Menurut Syata (2025) menyatakan bahwa bantuan sosial ialah bantuan berbentuk uang atau barang yang didistribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat, kelompok, keluarga, dan individu untuk digunakan sesuai dengan program pemerintah.

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan terjadi karena perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh setiap masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Menurut Kuncoro (2006), karena jarak geografis, serta perbedaan dalam kondisi produksi dan sumber daya yang tersedia, masyarakat mengalami kesenjangan pendapatan. Ada dua teori tentang ketimpangan pendapatan yakni ketimpangan absolut serta ketimpangan relatif. Teori pertama mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan parameter nilai tetap. Teori kedua mengukur ketimpangan distribusi dengan membandingkan pendapatan seluruh masyarakat dengan pendapatannya sendiri (Sukirno, 2006). Indeks Gini, yang memiliki nilai antara 0 dan 1, digunakan sebagai alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Nilai 0 pada indeks ini menunjukkan kesetaraan sempurna, yang berarti semua orang memiliki pendapatan yang sama (Todaro & Smith, 2020). Nilai 1 pada indeks ini menunjukkan ketimpangan sempurna. Dengan membagi tingkat garis datar sempurna dan kurva Lorenz dengan tingkat di sebelah kanan garis pemerataan kurva Lorenz, koefisien Gini dapat dihitung secara grafis. Nilai koefisien Gini yang lebih besar menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih tajam, sedangkan nilai koefisien Gini yang lebih kecil menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata (Todaro & Smith, 2020).

3. METODE

Jenis penelitian kuantitatif, berlokasi pada 31 provinsi Indonesia kecuali DKI Jakarta dan wilayah pemekaran Papua, dengan observasi data dari tahun 2018 hingga 2023, menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah perdesaan dengan satuan persen, realisasai dana desa menurut provinsi dengan satuan ribu rupiah, indeks pembangunan manusia menurut provinsi dengan satuan indeks, realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan menurut provinsi dengan satuan kepala keluarga, gini ratio menurut provinsi dan daerah

perdesaan dengan satuan indeks. Data realisasi dana desa dan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan ditransformasikan dalam bentuk *logaritma natural* (ln) karena data memiliki outlier tinggi, penyebaran ekstrim dan sangat bervariasi antar wilayah. Penelitian ini memakai regresi linear berganda untuk data panel. Studi ini menggunakan *cross-section* data dari 31 Provinsi Indonesia dan *time series* data dari 2018–2023 (Gujarati & Porter, 2012), dengan model persamaan yang diberikan di bawah ini.

$$PPMd_{it} = \beta_0 + \beta_1 LNDD_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 LNKPM_{it} + \beta_4 GR_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Dimana PPMd ialah Persentase Penduduk Miskin Perdesaan; DD ialah Realisasi Dana Desa; IPM ialah Indeks Pembangunan Manusia; KPM ialah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan; GRd ialah Gini Ratio Perdesaan; β_0 ialah Konstanta; $\beta_1, \dots, \beta_4$ ialah Koefisien regresi variabel independen; i ialah *Cross section*; t ialah *Time series*; dan ε ialah *Random error*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Ada tiga model dalam uji data panel yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Pemilihan model terbaik menggunakan Uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier. Dari hasil uji menunjukkan model terbaik yang tepat digunakan untuk mengkaji pengaruh realisasi dana desa, indeks pembangunan manusia, realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan dan gini ratio daerah perdesaan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia adalah *random effects model*. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas karena model terpilih *random effects model*. Hasil estimasi menunjukkan model terbebas dari masalah uji asumsi klasik.

Tabel 1. Estimasi Regresi *Random Effects Model*.

<i>Variable</i>	<i>Coeffisient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>t-Table</i>	<i>Prob.</i>
LNDD	-1,038958	-2,560980	1,973157	0,0113
IPM	-0,229725	-4,132053	1,973157	0,0001
LNKPM	-0,148339	-3,128937	1,973157	0,0020
GR	12,33354	3,530315	1,973157	0,0005
Konstanta	48,41832			
<i>R-squared</i>	0,374197			
<i>Adjusted R-squared</i>	0,360367			
<i>F-statistic</i>	27,05713			
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000000			

Sumber: *Eviews 13*, 2025.

Merujuk Tabel 1 persamaan dalam regresi data panel sebagai berikut:

$$PPM_{it} = 48,41832 - 1,038958LNDD_{it} - 0,229725IPM_{it} - 0,148339LNKPM_{it} + 12,33354GR_{it}$$

Persamaan tersebut menjelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 48,41832 menunjukkan bahwa jika realisasi dana desa, indeks pembangunan manusia, realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan, dan gini ratio daerah perdesaan nilainya 0 maka persentase penduduk miskin daerah perdesaan sebesar 48,41832 persen. Nilai koefisien regresi realisasi dana desa sebesar |-1,038958| menandakan bahwa setiap kenaikan realisasi dana desa sebesar 1 persen maka persentase penduduk miskin daerah perdesaan akan menurun sebesar |-1,038958| persen. Nilai koefisien regresi indeks pembangunan manusia sebesar |-0,229725| menandakan bahwa setiap kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 1 persen maka persentase penduduk miskin daerah perdesaan akan menurun sebesar |-0,229725| persen. Nilai koefisien regresi realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan sebesar |-0,148339| menandakan bahwa setiap kenaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan sebesar 1 persen maka persentase penduduk miskin daerah perdesaan akan menurun sebesar |-0,148339| persen. Nilai koefisien regresi gini ratio daerah perdesaan sebesar 12,33354 menandakan bahwa setiap kenaikan gini ratio daerah perdesaan sebesar 1 persen maka persentase penduduk miskin daerah perdesaan akan meningkat sebesar 12,33354 persen.

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adj R² square*) sebesar 0,360367 artinya variabel realisasi dana desa, indeks pembangunan manusia, realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan, gini ratio daerah perdesaan mampu menjelaskan 36,04 persen variabel persentase penduduk miskin daerah perdesaan, sisanya 63,96 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Uji F digunakan untuk menguji secara bersama-sama pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 27,05713 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,42156 artinya bahwa nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ dan nilai *probability* sebesar 0,000000 < tingkat alpha 0,05 menandakan keempat variabel yaitu realisasi dana desa, indeks pembangunan manusia, realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan, gini ratio daerah perdesaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia.

Pembahasan

Pengaruh Realisasi Dana Desa Terhadap Persentase Penduduk Miskin Daerah Perdesaan di Indonesia

Merujuk pada Tabel 1 hasil penelitian menunjukkan nilai *probability* sebesar $0,0113 < 0,05$ artinya realisasi dana desa terdapat pengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia. Hasil estimasi juga memperlihatkan nilai dari T_{hitung} sebesar $|-2,560980|$ dan nilai T_{tabel} sebesar 1,973157 artinya nilai dari $T_{hitung} < \text{nilai } T_{tabel}$ menandakan realisasi dana desa memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia, artinya bahwa kenaikan realisasi dana desa akan menurunkan persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia. Hasil penelitian sejalan dengan hipotesis penelitian yang mengungkapkan bahwa realisasi dana desa mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia.

Pengelolaan dan penyaluran dana desa yang optimal mampu menjadi instrument yang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan utama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendapatkan dana desa sebagai instrument pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan studi empiris Yacoub (2022) dan Sundarti & Robertus (2022) menjelaskan bahwa dana desa mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian oleh Otheliansyah & Hizwar (2023) yang menyatakan bahwa bantuan langsung tunai dana desa terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, program ini bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi yang dialami masyarakat miskin di pedesaan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Persentase Penduduk Miskin Daerah Perdesaan di Indonesia

Merujuk pada Tabel 1 hasil penelitian menunjukkan nilai *probability* sebesar $0,0001 < 0,05$ artinya indeks pembangunan manusia terdapat pengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia. Hasil estimasi juga memperlihatkan nilai dari T_{hitung} sebesar $|-4,132053|$ dan nilai T_{tabel} sebesar 1,973157 artinya nilai dari $T_{hitung} < \text{nilai } T_{tabel}$ menandakan indeks pembangunan manusia terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia, artinya bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia akan menurunkan persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia. Hasil penelitian sejalan dengan hipotesis penelitian yang menerangkan bahwa indeks pembangunan manusia terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia.

Sejalan dengan studi empiris Mersiana (2020) dan Sianturi *et al.*, (2021) mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sesuai dengan teori pertumbuhan baru, yang menegaskan pentingnya pemerintah

dalam meningkatkan pembangunan modal manusia. Pengurangan kemiskinan berkorelasi langsung dengan pembangunan manusia, karena tenaga kerja adalah aset utama bagi penduduk miskin, investasi dalam pendidikan dan kesehatan akan lebih bermanfaat bagi mereka dibandingkan dengan orang yang tidak miskin. Jika ada fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah, produktivitas akan meningkat, yang pada gilirannya akan menaikkan pendapatan.

Pengaruh Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan Terhadap Persentase Penduduk Miskin Daerah Perdesaan di Indonesia

Merujuk pada Tabel 1 hasil penelitian memperlihatkan bahwa nilai *probability* sebesar $0,0020 < 0,05$ artinya realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan terdapat pengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia. Hasil estimasi juga menampilkan nilai dari T_{hitung} sebesar $|-3,128937|$ dan nilai T_{tabel} sebesar 1,973157 artinya bahwa nilai dari $T_{hitung} < \text{nilai } T_{tabel}$ menandakan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia, artinya bahwa kenaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan akan menurunkan persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia. Sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial dari pemerintah, maka semakin berkurang persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan. Bantuan sosial dapat menaikkan daya beli dan konsumsi rumah tangga miskin, sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara nyata. Sejalan dengan penelitian oleh Fadhil & Nazila (2023) yang menjelaskan bahwa bantuan sosial berbentuk bantuan pangan non tunai (BNPT) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat miskin dapat ditingkatkan melalui program bantuan sosial, yang juga dapat membantu memecahkan rantai kemiskinan antar generasi (Syata, 2025). Penelitian oleh Karimah (2023) menyatakan bahwa PKH telah meningkatkan mutu hidup keluarga penerima manfaat dengan meningkatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, program ini dapat membantu keluarga miskin dan rentan untuk menurunkan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan dengan memberikan bantuan tunai melalui PKH.

Pengaruh Gini Ratio Daerah Perdesaan Terhadap Persentase Penduduk Miskin Daerah Perdesaan di Indonesia

Merujuk pada Tabel 1 hasil penelitian menampakkan bahwa nilai *probability* sebesar $0,0005 < 0,05$ artinya gini ratio daerah perdesaan terdapat pengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa nilai dari T_{hitung} sebesar 3,530315 dan nilai T_{tabel} sebesar 1,973157 artinya nilai dari $T_{hitung} > \text{nilai } T_{tabel}$ menandakan gini ratio daerah perdesaan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan nilai gini ratio daerah perdesaan akan meningkatkan persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia. Semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan antar rumah tangga di desa, maka semakin besar pula persentase penduduk miskin. Hal ini karena ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh kemiskinan; masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat mengejar laju pendapatan masyarakat menengah atas, yang merupakan faktor utama penyebab peningkatan ketimpangan pendapatan (Ahmad & Triani, 2019). Sejalan dengan penelitian Suparman *et al.*, (2021); Maskur *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan.

5. KESIMPULAN

Berlandaskan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa realisasi dana desa, indeks pembangunan manusia dan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia, sementara gini ratio daerah perdesaan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan dana desa pada kegiatan produktif, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja, serta memastikan bantuan sosial pangan tepat sasaran melalui pendataan yang akurat. Selain itu, kebijakan pemerataan pembangunan desa harus diperkuat melalui diversifikasi pendapatan, akses permodalan bagi kelompok miskin, dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas

DAFTAR PUSTAKA

- Abdjul, N. N. M. O., Bumulo, F., & Payu, B. R. (2023). Analisis Pengaruh Kebijakan Dana Desa Dan Output Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pedesaan Se-Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.37905/jsep.v1i1.21253>

- Ahmad, D., & Triani, M. (2019). Analisis Kausalitas Antara Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal EcoGen*, 1(3), 604-615. DOI: <http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.5031>
- Aini, S. N. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1).
- Aminah, A., & Jumaidah, J. (2022). Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Minat Usaha Masyarakat Desa Banea'Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. *Journal of Applied Management and Business Research (JAMBiR)*, 2(1), 24-29. DOI: <https://doi.org/10.38531/jambir.v2i1.40>
- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(2), 113-123.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi Lima*. Yogyakarta: UPP STIE-YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah, 2010 – 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Budhijana, R. B. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, index pembangunan manusia (IPM) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 2000-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5(1), 36-44.
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan: studi kasus di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 11-18. DOI: 10.31289/jab.v4i2.1513
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh Bantuan Sosial BPNT dan PKH Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and development*, 11(2), 196-202. DOI: 10.37081/ed.v11i2.4654
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karimah, S. (2023). Pengaruh Program Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wringinagung Kabupaten Pekalongan. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 304–313. Retrieved from <https://e-journal.uingsdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1779>
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- Lestari, N. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketertinggalan Desa di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., & Alwi, S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran Dn Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2017-2021. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 82-95.
- Maulidina, S., Zahara, V. M., & Sutjipto, H. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Pada Sektor Pertanian di Indonesia Bagian Barat. In *National Conference*

on Applied Business, Education, & Technology (NCABET) (Vol. 2, No. 1, pp. 257-269).

- Meriyanti, N. K. (2015). Pengaruh program indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap pengentasan kemiskinan di kecamatan buleleng tahun 2011-2014. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v3i1.12777>
- Mersiana, B. (2020). Analysis of The Effect of Gross Regional Domestic Product, Education, Open Unemployment, Minimum Wages and Human Development Index on Poverty Rate of West Nusa Tenggara Province in 2012-2017.
- Otheliansyah, G., & Hizwar, R. (2023). Pengaruh bantuan langsung tunai dana desa dan kemandirian desa di masa pandemi terhadap kemiskinan desa di indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(2), 94-105.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217-240.
- Rahmanta., Lubis, I., & Silalahi, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Sumatera UTara. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 7(1), 12-17.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287-295. DOI: <https://doi.org/10.23887/jiah.v9i3.22539>
- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 129-136. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>
- Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 71-79.
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Sianturi, V. G., Syafii, M., & Tanjung, A. A. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125-133. DOI: <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>
- Sinaga, M. (2020). Analysis of Effect of GRDP (Gross Regional Domestic Product) Per Capita, Inequality Distribution Income, Unemployment and HDI (Human Development Index) on Poverty. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(3), 2309-2317. DOI: <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1177>.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: Rajawali Press
- Suarni, S., Sylvia, S., & Sultan, M. S. (2022). Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial

- Tunai (BST) terhadap Pengurangan Tingkat Kemiskinan di Desa di Wilayah Kabupaten Barru. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sundarti, S., & Robertus, M. H. (2024). Pengaruh Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2020. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(2), 107-114.
- Suparman, S. (2021). Economic Growth, Income Inequality, and Poverty in Central Sulawesi. *Income Inequality, and Poverty in Central Sulawesi (November 01, 2021)*.
- Supraba, S. Y. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2015. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10152>
- Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*. 9(1):1-18.
- Syata, W. M. (2025). Efektifitas Program Bantuan Sosial Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 554-559. DOI: <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2486>
- Todaro, M. P., & Smith, S.C. (2020). *Economic Development Thirteenth Edition*, United Kingdom: Pearson Education.
- Triani, M., & Andrisani, E. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk dan Upah Terhadap Penawaran Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Geografi*, 8(1), 49-54.
- Triono, T. A., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia: Studi literatur laporan data kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 59-67.
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yacoub, Y. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pengangguran Perdesaan dan Kemiskinan Perdesaan Kalimantan Barat. In *Prosiding Seminar Nasional Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* (Vol. 5).
- Yuniarti, Q., & Imaningsih, N. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 44-52.